ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Oleh :

KUSNUL CHOTIMAH
NIM : 2012410950

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGESAHAN RANGKUMAN
TUGAS AKHIR

Nama	: Kusnul Chotimah
Tempat, Tanggal Lahir	: Gresik, 19 Mei 1994
NIM	: 2012410950
Program Pendidikan	: Diploma III
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Judul	: Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma	Dosen Pembimbing
Tanggal : 11 - 3 - 2015	Tanggal : 10 - 3 - 2015
Drs. Ec. Mochammad Farid, MM	**Putri Wulanditya, SE., M.Ak, CPSAK**

1.1 LATAR BELAKANG

Pentingnya informasi yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran mengharuskan setiap dinas, salah satunya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya agar dapat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya secara akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini antara lain :

1. Mengetahui kinerja pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011-2013.
2. Mengetahui kinerja belanja daerah pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011-2013.
3. Mengetahui kinerja pembiayaan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011-2013.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberi masukan bagi pihak – pihak yang terkait dengan pemerintah daerah sehubungan dengan masalah penganggaran. Dan bagi pihak yang lain dapat menggunakan penelitian ini untuk menambah wawasan maupun sebagai acuan membuat penelitian selanjutnya.

1.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan proses interview dan analisis deskriptif.

2.1 LANDASAN TEORI

Meunurut Bastian (2006 : 189), APBD merupakan pengejawatahan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Analisis kinerja pemerintah dalam realisasi APBD merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu perencanaan anggaran daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapakan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak. Analisis kinerja dapat dilakukan dalam 3 bagian yaitu Analisis Kinerja Pendapatan, Analisis Kinerja Belanja, dan Analisis Pembiayaan (Mahmudi, 2007).

3.1 GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai tugas utama melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berkedudukan di Jalan Jimerto 25-27 Lt. I-II, yang terbagi dalam 8 Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan wilayah kecamatan di Surabaya, dipimpin oleh Kepala Dinas bernama Bapak Yusron Sumartono,SE,MM. Tugas utama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dilaksanakan melalui pelayanan secara

tidak langsung dalam bentuk jasa, dengan melakukan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

4.1 PEMBAHASAN

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Secara umum kinerja pendapatan Kota Surabaya dapat dikatakan sangat baik meskipun pada realisasi pendapatan tahun 2013 terdapat selisih sedikit yang belum mencapai pendapatan yang telah dianggarkan. Hal ini di tunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2011 - 2013 yang mencapai rata-rata 98%. Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi, kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk menggali dan mengelola potensi yang dimiliki masih kurang. Sedangkan dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, kemampuan Pemerintah Kota Surabaya dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan tingkat kemandiriannya sebesar 114%.

Analisis terhadap kinerja belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan hasil yang dapat dikatakan sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perhitungan analisis varians belanja daerah sebesar 85%. Dan pembiayaan daerah menunjukkan pos SILPA yang bersaldo positif, yang berarti pemerintah Kota Surabaya sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran atau dengan kata lain realisasi SILPA tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan.

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dapat disimpulkan mengenai penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 yang mencakup pos-pos sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP 02.

Selanjutnya berdasarkan tujuan dari analisis kinerja anggaran dan pendapatan belanja daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Hasil dari analisis kinerja anggaran pendapatandaerah dengan realisasinya padaPemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2011-2013 secara umum dapat dikatakan sangat baik. Hanya pada Rasio Derajat Desentralisasi dapat dinilai cukup baik, karena masih menunjukkan angka 51%.

B. Hasil dari analisis kinerja anggaran belanja daerah dengan realisasinya padaPemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2011-2013 secara umum dapat dikatakan baik. Hanya pada Analisis Keserasian Belanja yang dinilai kurang baik, karena Pemerintah Kota Surabaya lebih mengalokasikan sebagian besar belanjanya untuk Belanja Operasi (belanja tidak langsung) daripada Belanja Modal (belanja langsung).

C. Hasil dari analisis kinerja pembiayaan daerah dengan realisasinya padaPemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2011-2013 pada pos SILPA menunjukkan saldo positif, yang berarti pemerintah Kota Surabaya sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran atau dengan kata lain realisasi SILPA tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan.

5.2 SARAN

Setelah mengetahui kesimpulan dari hasil analisis terhadap kinerja realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Kota Surabaya tahun anggaran 2011–2013 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan yang ditunjukkan melalui hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi yang masih rendah yaitu sebesar 51% pada tahun anggaran 2011-2013, menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya masih kurang dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki. Sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya lebih berusaha lagi untuk dapatmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal kinerja terhadap keserasian belanja daerah menunjukkan bahwa Pemerintah lebih mengalokasikan sebagian besar belanjanya untuk Belanja Operasi (belanja tidak langsung) daripada Belanja Modal (belanja langsung). Artinya pemerintah lebih memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan daripada untuk pembangunan daerah. Sebaiknya pemerintah tidak hanya memperioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan belanja untuk pembangunan daerah. Atau setidaknya seimbang antara belanja untuk pemerintahan (belanja tidak langsung) dan belanja untuk pembangunan daerah (belanja langsung).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta :Salemba Empat.

Ardon Fridolin Honga. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Emba Issn 2303-1174*. (Online), Vol.2 hal. 278-288. (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/, diakses 26 Desember 2014)

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013.

_____,Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012.

_____,Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011.

Indra Bastian.2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Erlangga.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta : UUP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13. Tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta

www.surabaya.go.id/profilpemerintah. Diakses 26 Desember 2014 21:45